

Kecerdasan Budaya Dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa

Amrullah¹, Muslim², Sri Nurhidayati³, Wiwi Noviati⁴, M. Salahuddin⁵
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB

Abstraksi

Masyarakat Sumbawa dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, karena dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, etnis, bahasa dan agama dengan konsekuensi terhadap pembawaan adat-istiadat serta sistem hidup yang berbeda-beda. Kondisi ini adalah salah satu modal utama yang jika disalahgunakan akan bisa berdampak negatif dengan munculnya sentimen-sentimen dan konflik komunal yang bisa merusak sistem kehidupan bermasyarakat. Proses mediasi, arbitrase dan negosiasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam meresolusi konflik selama ini. Sedangkan masih banyak metode atau pendekatan lain yang dirasa cukup efektif dan kadang terlupakan dalam pendekatan pencegahan dan resolusi konflik yaitu melalui pendekatan Kecerdasan Budaya. Sehingga riset ini, mencoba mengangkat masalah urgensi kecerdasan budaya dalam mencegah dan meresolusi konflik. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1). Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat?, 2). Siapa saja yang berperan sebagai struktural, akselerator dan pemakin atau trigger dalam konflik tersebut?, 3). Pendekatan apa saja yang selama ini digunakan dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat oleh pemerintah?, 4). Mengapa kecerdasan budaya sangat penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut?

Metode riset yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Dengan tujuan agar pengungkapan fenomena di lokasi penelitian secara leluasa memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada yaitu teknik observasi, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan keabsahan datayang terdiri dari Derajat kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), Ketergantungan (dependability), dan Kepastian (confirmability).

Hasil penelitian, bahwa Terjadinya konflik di Kabupaten Sumbawa disebabkan karena adanya faktor Struktural, Akselerator dan Trigger (SAT) konflik, misalnya seperti: masih ada dan kuatnya Political Memory dalam Masyarakat. Serta pentingnya Kecerdasan Budaya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, karena semua aspek-aspek yang ada dalam Kecerdasan Budaya seperti: Pengetahuan, Strategi, Motivasi dan Perilaku ternyata memiliki relevansi dan kemampuan untuk mendorong dan menciptakan suasana yang aman, damai dan harmonis dalam masyarakat sepanjang masyarakat bisa dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: *Kecerdasan Budaya, Pencegahan, Resolusi, Konflik*

Cultural Intelligence In The Prevention Process and Conflict Resolution in Sumbawa Regency

Amrullah¹, Muslim², Sri Nurhidayati³, Wiwi Noviati⁴

Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB

The Sumbawa community is known as a heterogeneous society, inhabited by people of various ethnic, ethnic, linguistic and religious backgrounds with consequences for different customs and systems of life. This condition is one of the main capital that if misused will be able to negatively impact the emergence of sentiments and communal conflicts that can damage the system of social life. The process of mediation, arbitration and negotiation is one of the approaches used in resolving conflicts over the years. While there are many other methods or approaches that are considered quite effective and sometimes forgotten in the approach of prevention and conflict resolution is through the approach of Cultural Intelligence. So this research, trying to raise the urgency issue of the cultural intelligence in preventing and resolving the conflict. The problems raised in this study are: 1). What factors can cause conflict in society ?, 2). Who actor that acts as a structural, accelerator and trigger or trigger in the conflict ?, 3). What approaches have been used in preventing and resolving the conflict in society by the government ?, 4). Why is cultural intelligence so important in preventing and resolving the conflict?

The research method in this research is descriptive-qualitative. The aim of this research that the disclosure of the phenomenon in the research location freely possible to get maximum results because the data is valid and can be accounted scientifically and rationally. Data collection techniques that is used in this research are techniques of observation, interview and documentation. Data analysis techniques start from the process of data collection, data reduction, data presentation, and data validity consisting of credibility, transferability, dependability and confirmability. The result of the research, that the occurrence of conflict in Sumbawa Regency caused by Structural factor, Accelerator and Trigger (SAT) conflict, for example: there is still and strong Political Memory in Society. As well as the importance of Cultural Intelligence in preventing and resolving of conflicts, as all aspects of Cultural Intelligence such as: Knowledge, Strategy, Motivation and Behavior have the relevance and ability to encourage and create a safe, peaceful and harmonious atmosphere in society as long as society can and able to internalize these values in everyday life.

Keywords: Cultural Intelligence, Prevention, Resolution, Conflict

LATAR BELAKANG

Konflik adalah dinamika masyarakat yang selalu muncul dan hadir dalam rentang sejarah manusia, sehingga hampir tidak ada manusia, individu, masyarakat atau bangsa dan negara yang tidak mengalami konflik atau selalu dalam keadaan harmonis. Keharmonisan adalah dambaan setiap orang dan juga masyarakat, tetapi memunculkan keharmonisan tentu tidak dengan semudah itu tanpa diawali oleh adanya gesekan-gesekan kecil maupun besar yang terjadi baik dalam diri individu maupun masyarakat itu sendiri. Menurut Kriesberg (1982), bahwa konflik tidak akan pernah hilang kecuali masyarakat itu telah hilang identitasnya baik secara fisik maupun non fisik, sebab ia adalah inheren dalam hubungan antar manusia (Ju, Lan:2008). Orang yang terdidik justru seringkali dianggap bertanggung jawab dalam beberapa konflik kekerasan dalam sejarah manusia.

Dalam berapa tahun terakhir, Terjadi pergeseran pola konflik yaitu secara sporadik tersebar merata di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan riset Institut Titian Perdamaian, selama tahun 2008 terjadi 1.136 insiden kekerasan di Indonesia. Artinya setiap hari rata-rata terjadi 3 insiden kekerasan. Hal ini menunjukkan potensi konflik--yang seringkali bermula dari kekerasan terbatas--masih sangat besar. Lebih lanjut menurut hasil riset ITP, terdapat beberapa kekerasan yang menonjol, yaitu Penghakiman Massa sebanyak 30% atau 338 insiden, Tawuran dengan 21% atau 240 insiden, Konflik Politik dengan 16% atau 180 insiden. Kemudian menyusul Konflik Sumber Daya Ekonomi sebanyak 11% atau 123 insiden, Konflik Sumber Daya Alam sebanyak 10% atau 109 insiden. Pengeroyokan menempati urutan selanjutnya dengan 4 % atau sebanyak 47 insiden. Disusul oleh konflik etnis/agama sebanyak 2% atau 28 insiden, dan lain-lain sebanyak 5% atau 56 insiden. Kekerasan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 1.736 orang luka-luka (ITP, TOR Munas, 2010). Masih banyak lagi kasus kekerasan dan konflik yang *up to date* yang mengisi mozaik sosial suram masyarakat Indonesia.

Tampaknya konflik telah mengisi dinamika keseharian masyarakat kita, bahkan yang mengkhawatirkan adalah, konflik telah melibatkan individu maupun kelompok yang bergerak secara sistematis, mulai terorganisir dan semakin memainkan peran penting dalam upaya mengeskalasi konflik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena faktor yang selama ini luput dari amatan para pemerhati konflik yaitu: faktor

Struktural, Akselerator dan *Trigger* atau SAT konflik. Kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan, memang sarat dengan keinginan, aspirasi, kebutuhan maupun kepentingan yang jika tidak terpenuhi akan cenderung untuk berkonflik dan mengkonflikkan dirinya atau dikonflikkan. Sehingga keberadaan stakeholder menjadi menarik untuk dianalisis dan dikaji secara serius.

Kehadiran stakeholder dalam kajian-kajian yang bertemakan kebijakan terlebih-lebih dengan riset bertemakan konflik, meskipun sudah lama dilakukan (Grimble dan Wellard, 1996), karena studi stakeholder berakar dari studi ekonomi politik dan juga studi lain yang sangat dekat dengannya seperti teori pengambilan keputusan, Amdal, PRA, multi kriteria analisis dan *conflict resolution*. Akan tetapi, secara eksplisit kajian mengenai stakeholder dalam kaitannya dengan konflik boleh dikatakan baru dan masih genit untuk selalu dikaji dan dianalisis, khususnya di Indonesia. Akan tetapi, realitas di lapangan ternyata stakeholder memainkan peran yang besar dalam upaya untuk mengadakan sekaligus meniadakan konflik, mengecilkan dan membesarkan konflik, menyulut api sekaligus memadamkan konflik. Karena stakeholder adalah individu/orang atau kelompok pemangku kepentingan kunci yang mampu memainkan pengaruhnya untuk mengubah sebuah kebijakan, regulasi atau proyek (Allen dan Kilvington, 2004; Grimble dan Wellard, 1996). Hal ini terjadi, karena kepentingan yang besar terhadap upaya untuk meraih status, kekuasaan, kekuatan ekonomi dan politik, penguasaan terhadap sumber daya alam dan karenanya mereka (stakeholder) seringkali dipersepsikan sangat dekat dengan konflik itu sendiri.

Munculnya konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal telah membawa perubahan dalam masyarakat, baik itu perubahan yang diinginkan (berdampak positif) maupun yang tidak diinginkan. Konflik ternyata sudah menjadi bahan diskusi yang tidak pernah habis-habisnya diperbincang oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan akademisi, praktisi, politisi maupun pemerintah terlebih lagi NGO's yang memang *concern* pada masalah-masalah konflik. *Ghirah* dalam melakukan studi lanjut tentang konflik ini mulai menguat pasca kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menjalar ke berbagai daerah-daerah di hampir seluruh Indonesia dan sampai hari ini masih banyak potensi konflik yang terpendam. Berbagai macam bentuk, ragam, model atau tampilan konflik telah membuktikan bahwa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara yang aman, ternyata begitu beringas, ganas dan sekaligus panas. Ia

sepertinya menjadi cepat sekali kering dan dengan begitu akan mudah tersulut api dendam yang akhirnya memunculkan konflik.

Munculnya konflik dalam pandangan sekilas memang terlihat sederhana dan bersahaja, tetapi apakah sesederhana itulah tampilan konflik. Sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk mencari aktor intelektual, pelaku maupun faktor pemicu serta pemakinnya (SAT) terhadap konflik. Sehingga untuk menyelesaikan konflik “meresolusi konflik”, terkadang pemerintah dapat saja mengambil jalan pintas dan tidak mau repot-repot, siapa yang terlibat secara langsung tangkap saja. Konsekuensi dari pendekatan itu adalah konflik ternyata tidak sesederhana itu untuk diselesaikan, malahan konflik selalu hilang dan tumbuh dan itupun mengambil diri dalam berbagai tampilan. Konflik hari ini seakan telah bermetamorfosa dalam sebuah jejaring sistem yang erat kaitannya dan rentan sekali dengan kebijakan, dengan SARA, dengan masalah SDA dan dengan Politik.

Proses mediasi, arbitrase atau negosiasi dapat saja menjadi pendekatan dalam meresolusi konflik. Tetapi dapat pula dibayangkan kalau konfliknya adalah konflik laten yang suatu waktu bisa saja menjadi nyala api yang bisa membakar semua yang ada di sekitarnya. Pendekatan ini hanya mungkin akan dapat melakukan pencegahan konflik secara temporer dan tidak mengakar serta menghunjam, karena akarnya perdamaian yang berusaha dibangun tidak kuat, sebab akar dan pohon itu tidak disiram secara kontinyu dan terus-menerus.

Di samping pendekatan resolusi konflik sebagaimana yang dikemukakan di atas, aspek lain yang kadang terlupakan dalam pendekatan resolusi konflik adalah masalah kecerdasan budaya yaitu konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Early dan Soon Ang Tahun 2003 dengan suatu asumsi bahwa globalisasi yang terjadi ternyata diikuti oleh semakin meningkatnya interaksi antar budaya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, ketegangan dan konflik budaya (Ang, Dyne dan Tan, 2010). Kecerdasan Budaya adalah Kemampuan individu dalam memahami, berfikir dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya (Ang, et.all, 2008), atau Kecerdasan Budaya sebagai kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai konteks budaya yang bervariasi.

Masyarakat Sumbawa dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, karena dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, etnis, bahasa dan agama dengan konsekuensi

pembawaan adat-istiadat serta sistem hidup yang berbeda-beda. Kondisi ini adalah salah satu modal utama yang jika disalahgunakan akan bisa berdampak negatif dengan munculnya sentiment-sentimen dan konflik komunal yang berujung bisa merusak sistem kehidupan bermasyarakat. Tetapi jika dikelola dengan baik, maka bisa menjadi modal utama untuk mendorong masyarakat yang damai dan harmonis guna memperlancar pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Sebagai contoh konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat Sumbawa mulai dari konflik Bali - Sumbawa Tahun 1980, tidaklah berlangsung lama dan lebih cepat dapat diselesaikan. Hal ini lebih dikarenakan oleh kemampuan setiap komponen masyarakat untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan banyak pihak. Sehingga kondisi yang semula mencekam, rasa was-was yang berlarut lebih cepat terselesaikan. Selain pendekatan hukum, ternyata pendekatan kekeluargaan juga ikut menjadi salah satu faktor pendukung untuk meminimalisir dan mencegah konflik. (lihat Syaifuddin Iskandar, dkk, 2009; Syaifuddin Iskandar, 2010).

Kemudian Peristiwa terbunuhnya Arniati seorang mahasiswa yang diduga dianiaya oleh pacarnya salah seorang anggota polisi yang terjadi sebelum Tanggal 22 Januari Tahun 2013 yang lalu, adalah awal mula lahirnya kekerasan dan telah menimbulkan korban harta benda yang tidak sedikit. Peristiwa yang awalnya dianggap sebagai kasus individu merembet menjadi kekerasan yang mengatasmakan isu SARA dan telah mengganggu keharmonisan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat Sumbawa. Di samping itu, di Sumbawa memang sudah ada sejarah konflik sebelumnya, terutama konflik horizontal antara Bali dengan Sumbawa, kemudian pertambangan seperti pembakaran Camp Dodo-Rinti Tahun 2005 dan luapan-luapan maupun gesekan-gesekan kecil yang jika dibiarkan akan melahirkan konflik besar dalam masyarakat. Munculnya gesekan-gesekan yang bermuara ke konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya *political memory* dan ketika kejadian-kejadian tertentu kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan adanya ketenangan, kedamaian dan ketertiban, lalu didorong lewat isu-isu yang sensitif sifatnya, maka konflik akan cepat sekali terjadi. Meskipun demikian, bukan berarti konflik tidak bisa diselesaikan, hanya saja ada beragam metode yang bisa dikembangkan sesuai dengan

karakter dan sikon dari ragam konflik yang ada. (lihat Amrullah & Sri Nurhidayati, 2013; Muslim & Amrullah, 2016).

Kondisi riil hari ini yang terlihat dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan, memang tidak ada sebetulnya pra kondisi yang bisa dikonsolidasikan secara massif sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan dan kekerasan vulgar yang bisa mengarah kepada konflik komunal terbuka yang berbahaya. Akan tetapi, sebagaimana informasi yang ditemui di lapangan bahwa Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Kabupaten yang masuk dalam zona rawan konflik baik itu konflik politik seperti Pemilu (lihat KPUD NTB, edisi Rabu 29 Juli 2015 dalam Viva.co.id diakses tanggal 28 Juni 2017) yang menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah rawan konflik politik. Kemudian sebagai daerah rawan konflik pertambangan (Amrullah, Muslim, dkk, 2013; Lab.Socio UI, 2012; <https://Investigasi.tempo.co.id>, diakses Tanggal 28 Juni 2017), begitu juga dengan Walhi yang sudah mencatat bahwa Sumbawa masuk dalam kategori daerah rawan konflik dari 22 daerah yang ditetapkan juga oleh pemerintah terkait pertambangan (JPNN.COM, Edisi 27 Februari 2012; www.radarbangka.co.id, diakses Tanggal 28 Juni 2017). Begitu juga dengan adanya kondisi kerentanan akan konflik sosial-budaya dan ekonomi akibat daerah tersebut masih masuk dalam kategori daerah tertinggal, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah telah menetapkan ada sekitar 122 Kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal termasuk Kabupaten Sumbawa (<https://m.detik.com>, edisi Kamis 10 November 2015; Lihat juga Kabupaten Sumbawa dalam Profil Kerentanan Bencana Alam, 2016, diakses Tanggal 30 Juni 2017).

Kondisi di atas, jika tidak ada program dari pemerintah yang lebih terencana dan sistematis dengan pendekatan pencegahan dini konflik tidak menutup kemungkinan akan menjadi suatu kondisi yang bisa mengarah kepada lahirnya konflik terbuka yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat secara umum. Munculnya konflik bukan saja dikarenakan oleh isu-isu atau masalah-masalah besar seperti Tambang atau Politik, akan tetapi bisa juga disebabkan oleh masalah biasa-biasa, misalnya karena perkelahian anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, perjudian, narkoba dan lain-lain. Kondisi ini juga tidak lepas dari faktor desakan perubahan sosial dan budaya yang semakin merembes ke daerah bahkan sampai ke kampung-kampung.

Berbagai kasus baik yang bersifat individu maupun komunal yang terjadi, memang tidak bisa lepas dari faktor perubahan sosial budaya yang cepat dalam masyarakat dan dapat berujung konflik jika kondisinya dibiarkan bereskalasi. Memang banyak pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Akan tetapi, pendekatan-pendekatan yang pernah dilakukan dan diambil lebih fokus kepada pendekatan penyelesaian belum sepenuhnya digunakan sebagai pendekatan pencegahan. Sementara konflik ibarat abu dalam sekam yang kapan saja dan di mana saja bisa muncul ketika sumpunya dinyalakan.

Konflik ke depan bisa dicegah dan diresolusi dari sekarang, jika cara meresolusi konflik ikut memperhatikan pendekatan kecerdasan budaya di dalamnya. Sehingga masyarakat Sumbawa yang heterogen dan multi etnik tetap mampu dijaga koeksistensinya lewat harmonisasi lintas suku, agama dan etnis yang ada dan inipun bisa menjadi modal penting bagi kelancaran proses pembangunan yang ada.

Sementara itu, ada konsep lain yang bisa dipakai untuk mendorong agar konflik bisa dicegah dan diselesaikan yaitu Kecerdasan Budaya. Konsep yang pertama kali digagasaksikan oleh Early dan Soon Ang pada Tahun 2003 yang merujuk kepada efek dari globalisasi yang telah melahirkan interaksi antar budaya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, ketegangan dan konflik budaya (Ang, Dyne dan Tan, 2010). Sementara kecerdasan budaya sendiri dapat dimaknai sebagai “kemampuan individu dalam memahami, berfikir dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya dalam berbagai konteks budaya yang bervariasi (Ang, dkk, 2014). Dengan kata lain, kecerdasan budaya adalah kemampuan untuk memahami, mengelola dan berhadapan dengan emosi-emosi orang lain dalam konteks antar budaya atau merupakan bentuk spesifik dari kecerdasan interpersonal. Ada empat faktor yang perlu dilihat dalam memahami kecerdasan budaya (Early & Ang, 2008), yaitu sebagai berikut: **Pengetahuan** (Merujuk kepada struktur pengetahuan individu tentang institusi kultural, norma-norma, praktek-praktek dan konvensi-konvensi dalam setting budaya yang berbeda), **Strategi** (kecerdasan yang mencakup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara dan aturan baru bagi interaksisosialnya), **Motivasi** (kemampuan individu dalam mengarahkan perhatian, minat dan energinya untuk terlibat, mempelajari dan berfungsi secara efektif saat berada dalam situasi perbedaan antar budaya), dan **Perilaku**

(kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku-perilaku baik verbal maupun nonverbal yang sesuai saat dia berinteraksi).

Secara garis besar, riset ini dilakukan untuk: 1). Melakukan *trajectory* terhadap semua hal yang erat kaitannya dengan urgensi kecerdasan budaya untuk proses pencegahan dan resolusi konflik dalam masyarakat. 2). Menghimpun berbagai sumber data dan informasi terkait dengan model dan pendekatan yang telah dilakukan terkait dengan pencegahan dan resolusi konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat. 3). Membuat dan menyusun Laporan dan panduan mengenai model pencegahan dan resolusi konflik.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat potensi terjadinya konflik dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Sumbawa tetap saja ada. Sehingga upaya pencegahan terhadap munculnya konflik menjadi keniscayaan untuk terus dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas itulah, kami tertarik untuk mencoba melihat, mengidentifikasi dan membuat variabel-variabel penting dari kecerdasan budaya masyarakat dalam mencegah konflik di Sumbawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sentral yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Urgensi Kecerdasan Budaya dalam upaya untuk Mencegah dan Menyelesaikan Konflik dalam masyarakat? dari masalah pokok di atas, kemudian diturunkan ke dalam masalah turunannya sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat?
- b. Siapa saja yang berperan sebagai struktural, akselerator dan pemakin atau *trigger* dalam konflik tersebut?
- c. Pendekatan apa saja yang selama ini digunakan dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat oleh pemerintah?
- d. Mengapa kecerdasan budaya sangat penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut?

LANDASAN TEORETIK

a. Konsep Tentang Konflik

Konflik adalah bagian dari hidup kita. Seperti dikatakan oleh Louis Kriesberg (1973), konflik (sosial) selalu ada di sekitar kita karena mereka inheren dalam hubungan

antar manusia. Akan selalu ada perebutan sumber daya ataupun upaya mempertahankan kekuasaan yang menggunakan berbagai bentuk konflik untuk kepentingan kekuasaan. Definisi konflik yang sederhana adalah dari Coser (1956) bahwa konflik merupakan pertarungan antara dua atau lebih orang dalam mempertentangkan nilai-nilai, atau dalam kompetisi untuk status, kekuasaan dan sumber daya yang terbatas, dimana tujuan masing-masing pihak adalah menetralisasi, melukai dan menghilangkan lawannya. Konsep konflik yang lebih luas adalah apa yang dikatakan oleh Agerback (1996) dalam Lyinn dan Davis (2004) sebagai pertentangan (*dispute*). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang pertama tidak mencakup resolusi yang bersifat konsensus, sementara yang kedua berarti bahwa konflik bisa ditangani. Selama ada saluran untuk dan bisa dilakukan dialog, partisipasi dan negosiasi, konflik itu bersifat konstruktif. Ketika jalur-jalur untuk dialog, partisipasi dan negosiasi ditutup, maka muncul kekecewaan, frustrasi dan kemarahan yang diekspresikan dalam bentuk protes, represi dan kekerasan.

Konflik (kekerasan) bervariasi dalam hal alasan dasarnya, lamanya, caranya, hasilnya dan juga konsekuensinya, dan ini terkait dengan 1). Isu yang dikonflikkan; 2) Karakteristik pihak-pihak yang berkonflik; 3). Hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik; dan 4). Cara yang dipergunakan masing-masing untuk berkonflik¹. Konflik adalah pertentangan antara dua kelompok orang, bukan antara individu-individu yang bertindak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, konflik pada hakekatnya menyangkut penyebab dan proses, yang secara detail bisa dijelaskan sebagai berikut: a). Ada kepentingan atau tujuan yang sangat jelas saling bertentangan; b). Ada keyakinan bahwa aspirasi kedua belah pihak tidak bisa dicapai secara bersamaan; c). Ada pertarungan nilai, klaim atas status, kekuasaan, atau sumber daya; d) ada tahapan antara dari pertarungan yang semakin meninggi dan menjadi lebih destruktif.

Secara tradisional konflik terbagi atas *konflik kognitif* dan *konflik afektif*. Konflik kognitif terbuka dan terkait dengan penugasan, isunya terfokus pada peranan, kebijakan dan sumber daya, serta meningkatkan penampilan kelompok. Konflik afektif lebih halus, pada tingkat proses dan terkait dengan pemeliharaan kelompok dan dinamika antar personal, isunya terfokus pada norma dan nilai-nilai, dan penampilan yang dianggap kurang dan kepuasan. Bentuk konflik afektif adalah kebencian dan

¹ Kriesberg, opcit., hal.3.

kecemburuan. Bila sesuatu (yang fungsional) menjadi konflik, misalnya kebijakan kurikulum yang berarti bahwa orang-orang mengambil posisi sehubungan dengan identitas mereka – maka isu-isu afektif biasanya akan muncul pula. Dimensi waktu biasanya terkait dengan isu tahapan, yaitu kapan suatu perbedaan pendapat menjadi konflik.

b. Penyebab Konflik

Dalam kajian teori tentang konflik, terjadinya konflik disebabkan oleh banyak faktor yang berkelit-kelindan satu dengan yang lain. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik, antara lain:

- a. *Attribution theory* – kecenderungan manusia untuk memberikan label positif pada diri sendiri dan label negatif kepada orang lain.
- b. *Equity theory* – Konflik dilihat dari perspektif keadilan distributif. Orang menjadi kesal atau marah ketika mereka merasa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari apa yang mereka anggap berharga.
- c. *Field theory* – Setiap tindakan manusia merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan kontekstual dengan ekspektasi atas dasar faktor pendorong dan penarik, komitmen dan loyalitas.
- d. *Interactionist theory* – Konflik merupakan hasil dari negosiasi yang berkelanjutan tentang apa yang dihargai, bagaimana tingkah laku diinterpretasikan dan pengertian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- e. *Psychodynamic theory* – Orang umumnya mendekati suatu persoalan dari suatu keadaan tanpa kesadaran, seperti kekhawatiran, ego, ketakutan, keagresifan atau rasa bersalah.
- f. *Social exchange theory* – didasarkan pada analisa pasar. Setiap orang membuat pilihan berdasarkan kepentingan pribadi dan mempertimbangkan untung-ruginya.
- g. *Phase theory* – Konflik terjadi tahapan tingkah laku yang mudah diterka; tingkah laku yang menyulut konflik dapat diidentifikasi; tingkah laku spesifik cenderung meningkatkan dan mengekalkan konflik.

- h. Systems Theory* – Setiap kelompok mempunyai „organisasi“ sebagaimana organisme biologis.
- i. Transformational theory* – Konflik tidak selalu disfungsional, melainkan mempunyai fungsi sosial yang vital sebagai tempat di mana ketegangan dilepaskan dan norma komunal yang baru ditetapkan atau diperbaiki.
- j. Complexity shutdown theory* – Konflik yang negatif muncul ketika ada kekurangan dalam hal konektivitas, masukan, penggunaan informasi dan kemauan untuk mengambil manfaat dari keragaman.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu tentang konflik di Indonesia, Indonesia termasuk daerah yang memiliki potensi konflik di semua propinsi dan daerah-daerah kabupaten. Berdasarkan data-data yang ada, terdapat kurang lebih 22 Provinsi di Indonesia yang memiliki kecenderungan terjadinya konflik, bila dilihat dari sumber konflik dan prediksi sumber munculnya konflik. Sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Isu Strategis Munculnya Konflik di Indonesia

No.	Propinsi	Kabupaten, Kota, Kecamatan	Sumber Konflik Faktual	Prediksi Sumber Konflik
1	Sulawesi Tengah	1. Palu 2. Poso & Tentena 3. Morowali	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik/Agama • Pemekaran wilayah • Konflik Elit Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik/Agama • Pemekaran Wilayah • Akses Sumber Daya
2	Sulawesi Selatan	1. Mamasa 2. Makassar 3. Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> • Pemekaran Wilayah • Akses Sumber Daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemekaran Wilayah • Akses Sumber Daya
3	Papua	1. Manokwari 2. Mimika 3. Jayapura 4. Sentani 5. Fak-Fak	<ul style="list-style-type: none"> • Mistrust terhadap pemerintah • Identitas • Akses & Kontrol Sumber Daya • Gerakan Bersenjata • Konflik Elit Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemekaran Wilayah • Pembangkangan Sipil • Akses dan Kontrol Sumber Daya
4	Maluku	1. Ambon 2. Maluku Tengah 3. Lease	<ul style="list-style-type: none"> • Segregasi Wilayah • Agama/Etnik • Pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa Tanah • Pemekaran Wilayah • Pengungsi
5	Maluku Utara	1. Ternate 2. Tidore	<ul style="list-style-type: none"> • Segregasi Wilayah • Agama/Etnik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa Tanah • Pemekaran Wilayah

		3. Tobelo & Galela	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungsi
6	Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larantuka 2. Atambua 3. Kupang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungsi • Elit Lokal • Perebutan Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik/Agama • Perebutan Sumber Daya Alam
7	Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bima 2. Mataram 3. Dompu 	<ul style="list-style-type: none"> • Elit Lokal • Akses Sumber Daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik/Agama • Perebutan Sumber Daya Alam
8	Nanggroe Aceh Darussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Aceh Jaya 2. Kab. Pidie 3. Kab. Bireuen 4. Kab. Aceh Utara/ Lhokseumawe 5. Kab. Aceh Tengah 6. Kab. Aceh Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Apatisme dan Mistrust masyarakat terhadap pemerintah Pusat dan Daerah • Kekerasan bersenjata • Perampokan sumberdaya alam Daerah oleh Pemerintah Pusat • Identitas ke Aceh-an • Dendam dan trauma akibat kekerasan militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Dendam dan trauma akibat kekerasanh militer • Mistrust terhadap pemerintah • Kekerasan bersenjata • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam
1.	Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medan 2. Deli Serdang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungsi • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik dan Agama • Pengungsi • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam
2	Riau Daratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam
3	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perampokan Sumberdaya Laut oleh kapal-kapal asing • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Perampokan Sumberdaya Laut oleh kapal-kapal asing • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan laut
4	Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas

		Lampung 2. Bakauheni 3. Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Etnik 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Etnik
5	Kalimantan Barat	1. Pontianak 2. Sambas	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Pendatang dengan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Pendatang dengan Local
6	Kalimantan Tengah	1. Palangkaraya 2. Sampit 3. Pangkalanbun	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Pendatang dengan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Etnik • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam • Pendatang dengan Local
7	Kalimantan Timur	1. Samarinda 2. kutai Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas • Akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam
8	Jakarta	1. Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi Kuat
9		2. Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang antara masyarakat miskin dengan kaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang antara masyarakat miskin dengan kaya
10	Banten	1. Banten 2. Ciligon	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang sektor industri dan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perebutan ruang sektor industri dan Pertanian
11	Jawa Barat	1. Bandung 2. Garut	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Kehutanan dengan petani • Pendatang dan masyarakat lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Kehutanan dengan petani • Pendatang dan masyarakat lokal

12	Jawa Timur	1. Surabaya 2. Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • Perhutani dan perkebunan skala besar dengan petani • Politik • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhutani dan perkebunan skala besar dengan petani • Politik • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi Kuat
13	Jogyakarta	1. Jogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Petani dan tuan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani dan tuan Tanah
14	Jawa Tengah	1. Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendukung Partai • Benturan antara kelompok ekonomi kuat dengan lemah • Majikan dengan buruh • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi kuat • Pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendukung Partai • Benturan antara kelompok ekonomi kuat dengan lemah • Majikan dengan buruh • Perebutan ruang antara kelompok masyarakat miskin dan perkantoran • Sektor-sektor informal dengan kelompok ekonomi kuat • Pencemaran lingkungan

Sumber: Mustofa, 2006

Meskipun data di atas adalah data lama, tetapi berdasarkan pembagian cluster terbaru mengenai daerah rawan konflik di Indonesia, akan tetapi hampir semua daerah – daerah yang disebutkan di atas sampai sekarang masih dianggap sebagai daerah rawan konflik. Bahkan menurut data terbaru menyebutkan bahwa NTB termasuk Sumbawa juga menjadi salah satu daerah rawan bencana atau konflik yang harus tetap diwaspadai.

Sehingga program-program berbasis *conflict prevention* menjadi keniscayaan untuk segera dibuat.

Terjadinya konflik di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik kesenjangan sosial-ekonomi, konflik pertambangan, konflik politik, konflik tanah, konflik lingkungan dan sebagainya. Semua faktor di atas, dapat dibagi dalam tiga kategori besar yaitu: Struktural, Akselerator dan *Trigger* atau Pemakin atua biasa dikenal dengan SAT Konflik. Struktural berada dalam aras kondisi yang lebih umum dan pra kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian Akselerator bermain pada ranah kebijakan atau kondisi-kondisi yang menyebabkan konflik bisa terjadi secara cepat, dan Pemakin atau *Trigger* konflik adalah pemicu lahirnya konflik.

Tabel di bawah ini memperlihatkan matrik perbandingan konflik yang terjadi di semua wilayah Indonesia yang tidak lain adalah bagian hasil analisis Struktural, Akselerator dan *Trigger* Konflik maupun stakeholder konflik itu sendiri.

Tabel 2. Matrik Perbandingan, SAT dan Stakeholder Konflik di Indonesia

Wilayah Konflik	Akar Konflik	Pemicu	Pelaku	Peran Pemerintah dan Apparatusnya	Peran Masyarakat
Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengakuan identitas dan martabat masyarakat Aceh dalam kerangka negara Indonesia • Eksploitasi sumberdaya alam oleh Negara dan ketidakadilan dalam distribusinya. • Pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan oleh Negara/Militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembasmian gerakan perlawanan dengan operasi militer • Negara melakukan pendekatan kekerasan • Permintaan "maaf" yang bersifat pura-pura dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat • Militer Indonesia (TNI dan POLRI) • Gerakan Aceh Merdeka • Masyarakat lokal • Pemimpin-pemimpin agama • Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah pusat untuk menekan perlawanan masyarakat lokal • Meneruskan dialog antara Aceh dan Jakarta, tetapi gagal • Menghentikan bantuan kemanusiaan ke Aceh • Pembuatan undang-undang syari'ah Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan masyarakat untuk merdeka dari Jakarta • Masyarakat lokal bersatu untuk menyuarakan penghentian kekerasan di Aceh melalui gerakan protes dari masyarakat sipil
Papua/Irian Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengakuan identitas budaya dan pola hidup masyarakat lokal • Eksploitasi dan perampokan tanah dari masyarakat adat setempat • Keterlibatan militer dalam kekerasan • Lemahnya posisi tawar-menawar dari masyarakat lokal dibandingkan dengan masyarakat pendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan aktivis kemanusiaan • Pengibaran bendera "Bintang kejora" diikuti oleh insiden kekerasan • Pertikaian antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal • Mobilisasi militer dalam jumlah besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan pemerintah pusat secara sepihak • Militer Indonesia (TNI dan POLRI) • Institut masyarakat adat • Pemimpin-pemimpin adat lokal dan pemimpin-pemimpin agama • Organisasi Papua Merdeka (OPM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan militer dan pemerintah pusat berlawanan dengan kepentingan masyarakat setempat • Pemberian status otonomi "khusus" oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Papua secara sepihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga adat setempat membuat kelompok-kelompok militan di Papua • Gerakan perdamaian di Papua siap meneruskan perundingan dengan negara dan pemimpinnya
Sambas, Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah pusat • Kebijakan demografis dalam pemisahan suku/etnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemukulan dan panahanan terhadap masyarakat Madura yang dinyatakan sebagai pencuri di Parit Setia • Dominasi suku dalam beberapa posisi di dinas umum • Marginalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Militer dan polisi Indonesia • Organisasi sosial • Pemimpin-pemimpin sipil dan keagamaan • Kelompok-kelompok suku Dayak, Madura dan Melayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi pengungsi • Evakuasi pengungsi • Tindakan represif dari Institusi keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal menolak pe-ngungsi • Masyarakat lokal dan pemimpin-pemimpin agama mengadakan pendekatan untuk rekonsiliasi

		masyarakat sipil	• Pengungsi		
Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik elit militer dan masyarakat sipil • Eksploitasi sumberdaya laut • "Budaya kekerasan" antara masyarakat pendatang dengan sistem budaya setempat • Partisipasi hukum dan politik mas-yarakat lokal termarginalisasi • eksploitasi dan politisasi yang ber-lebihan dari kombinasi jalur keagamaan dengan provokasi kekerasan dan operasi intelegen • Distorsi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkelahian antara 2 (dua) pemuda • Pengrusakan rumah masyarakat • Pengrusakan rumah dan tempat ibadah muslim dan kristen (mesjid dan gereja) • Tingkat kekerasan militer yang ter-terjadi selama darurat militer dan darurat sipil 	<ul style="list-style-type: none"> • Militer dan Polisi Indonesia • Pemerintah pusat • Pemerintah daerah • Rencana pemisahan masyarakat ber-dasarkan bidang agama dan sosial • Masyarakat adat lokal/setempat • NGO's 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah lambat dan lemah dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian • Institusi keamanan terlibat dalam konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mudah diprovokasi • Masyarakat hidup dari konflik yang berkepanjangan • Inisiatif korban (masyarakat) untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian
Poso, Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Marginalisasi masyarakat lokal • Pemberian tanah masyarakat kepada perusahaan-perusahaan penebangan kayu dari Jakarta • Konflik elit politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkelahian antar remaja/pemuda • Polarisasi sosial terus-menerus dan sen-timen jalur keagamaan • Persaingan posisi publik oleh elit-elit politik lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Elit-elit politik lokal dan Jakarta • Masyarakat lokal • Pengungsi • NGO's • Mahasiswa • Militer dan polisi Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan penyelesaian untuk pengungsi • Mediasi dan dialog 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mudah terprovokasi dalam tindak kekerasan • Inisiatif rekonsiliasi dari masyarakat lokal
Sampit, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi sumberdaya alam • Kekuasaan yang berlebihan dari masyarakat elit dalam ruang politik lokal • Menolak konteks perimbangan yang berlawanan dengan kepercayaan mas-yarakat Dayak • Kekerasan terhadap kelompok etnis masyarakat Madura sebagai masyarakat pendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keributan antara kelompok pemuda (Des, 98) • Pembakaran rumah dan tempat tinggal masyarakat dengan sengaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Militer dan polisi Indonesia • Organisasi masa sosial • Pemimpin agama dan masyarakat sipil • Kelompok-kelompok etnis Dayak, Madura dan Melayu • Mahasiswa • Pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan penyelesaian untuk masyarakat yang terlantar • Mediasi dan dialog • Beberapa institusi keamanan terlibat dalam konflik dan pertikaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal memiliki inisiatif untuk proses rekonsiliasi

Sumber: Mustofa, 2006

Berdasarkan data-data yang ada di atas, dapat dikatakan bahwa terjadinya konflik, khususnya di Indonesia tidak bisa lepas dari serangkaian pra kondisi yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politik identitas, bernuansa politik komunal dan bersifat horizontal yang mengarah kepada keterlibatan negara di dalamnya dan berujung konflik vertikal. Terjadinya konflik baik di tingkat lokal maupun nasional telah menguras tenaga, waktu dan biaya terlebih lagi korban baik harta maupun nyawa orang-orang yang tidak berdosa.

c. Konflik Antar Etnik

Menurut Horowitz (1985) bahwa munculnya konflik antar etnik biasanya berhubungan dengan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat atau dengan kata lain konflik terjadi sejalan dengan berlangsungnya proses modernisasi. Dalam

pandangan Horowitz, konflik antar etnik terjadi karena adanya ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh berbagai etnik dengan dilakukannya modernisasi. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sektor modern adalah penyebab utama mengapa konflik antar etnik sering terjadi (Iskandar, 2006).

Konflik bernuansa suku, agama atau etnis yang berlangsung disebabkan karena aneksasi kapitalisme yang menggelora, keterpinggiran yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat isolasi budaya dan adat-istiadat yang dirasakan oleh suatu kelompok masyarakat, stereotif negatif yang selalu dipertahankan dan dimunculkan. Lebih lanjut Iskandar (2006) melihat bahwa ada tiga sumber konflik yang dominan, yaitu adanya:

(1) sikap etnosentrisme (2) pandangan stereotip ; dan (3) prasangka.

Pertama, Sikap Etnosentrisme diartikan sebagai suatu kecenderungan yang melihat nilai dan norma kebudayaan sendiri sebagai sesuatu yang mutlak serta menggunakannya sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai dan mengukur kebudayaan kelompok lain. (Priyono, 1984). Sebagai contoh: orang Jawa menilai orang Arab atau orang Cina bersikap individualistis, karena dianggap tidak pernah ikut kerja bhakti atau siskamling. Sementara bagi orang Arab atau orang Cina, bahwa kerja bhakti atau gotong royong itu tidak harus dengan terlibat langsung secara fisik, tetapi dapat diganti dengan uang.

Kedua, Pandangan Stereotip, stereotip sendiri menurut Verdeber (1986:40), adalah sikap atau karakter yang dimiliki seseorang yang menilai orang lain semata-mata berdasarkan pengelompokkan kelas atau pengelompokkan yang dibuatnya sendiri. Stereotip juga bisa dimaknai sebagai keyakinan seseorang terhadap orang lain yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya. Keyakinan tersebut membuat seseorang/kelompok orang memperkirakan perbedaan antar kelompok mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai ciri khas seseorang maupun kelompoknya. (Johnson, 1986:382). Stereotip juga bisa berarti stigma dan cacat (lihat Harald Eidheim, dalam Barth, 1969), yang melihat adanya dikotomi etnik di Norwegia sebagai golongan mayoritas dan orang Lapp sebagai minoritas. Orang Lapp dianggap memiliki ciri-ciri “cacat sosial”, yang dinilai: (1) jarang aktif dalam kegiatan bersama (2) berbahasa Norwegia dengan buruk, (3) tampak dari namanya yang khas, (4) dianggap selalu berbuat menurut kemauannya sendiri. Jadi stereotip cenderung mengarah pada sikap

yang negatif terhadap orang lain. Gerungan (1988:168), mengemukakan bahwa stereotip mengenai orang lain sudah terbentuk pada orang yang berprasangka sebelum ia memiliki kesempatan untuk bergaul secara wajar dengan orang yang dikenakan prasangka tersebut. (Iskandar, 2006)

Kemudian Mulyana (1990:) menunjukkan sifat-sifat (*image*) negatif terhadap etnik lain, seperti sebutan: pemalas, penakut, angkuh, gila jabatan, mementingkan diri sendiri, licik, bodoh, kasar, pembual, kolot, tidak bisa diharap, dan sebagainya. Sehingga konflik antar etnik ini bisa terjadi dan akan selalu terjadi jika kondisi tersebut terpelihara.

Ketiga, faktor ketiga munculnya konflik antar etnik adalah adanya Prasangka. Effendy (1981:44), menyatakan prasangka dalam hubungan antar etnik merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat dalam proses interaksi, oleh karena orang-orang selalu bersikap curiga dan menentang orang yang dihadapi. Dalam prasangka, emosi memaksa untuk menarik kesimpulan atas dasar curiga tanpa menggunakan fakta-fakta yang ada (Iskandar, 2006).

Penjelasan tentang lebih lanjut tentang prasangka, dikemukakan oleh Johnson (1986) sebagaimana dikutip oleh Iskandar (2006), menyatakan bahwa prasangka disebabkan oleh: (1) adanya gambaran perbedaan antar kelompok, (2) perbedaan nilai yang dimiliki kelompok lain, yang menguasai kelompok minoritas, (3) adanya stereotip, (4) adanya perasaan superior pada kelompok sendiri. Sedangkan Zastrow (1989), menjelaskan bahwa prasangka dapat bersumber dari: (1) adanya usaha mempertahankan diri secara berlebihan, (2) sikap frustrasi, agresi, kecewa dan mengarah kepada sikap menentang (3) adanya ketidaksamaan dan rendah diri, (4) kesewenang-wenangan, (5) alasan histories, (6) persaingan tidak sehat dan menjurus ke arah eksploitasi, (7) cara-cara sosialisasi yang berlebihan, (8) memandang kelompok lain dengan pandangan yang sinis. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik itu ada tiga jenis yang biasanya ditemui dalam masyarakat. Secara garis besar mengenai jenis dan karakteristik konflik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3: Jenis- Jenis Konflik dan Karakteristik Menurut Kajian Tekstual

No.	Jenis Konflik	Elaborasi	Cara dan Aktor	Media Provokasi
1	Konflik Horisonta	Desa vs Desa Pemuda vs Pemuda	Spontan Face to Face	Aktor Internal Elit

		Suku vs Suku Agama vs Agama Negara vs Negara	Multi Media Kode Alam Aktor Eksternal	Kelas Preman Agen Rahasia Teroris
2.	Konflik Vertikal	Buruh Vs Majikan Staf vs Atasan Rakyat vs Raja Daerah vs Negara	Simbol Budaya	Premanisme
3.	Konflik Tanpa Pola	Amuk Massa Lokal Amuk Massa Nasional Revolusi Sosial		

Sumber: Wayan Genya (2002)

d. Konflik Sosial-Budaya

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2010 bahwa di Indonesia ada sekitar 1.128 suku dengan beragam adat-istiadat, agama dan kepercayaannya. Masyarakat yang heterogen ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman ini bisa menjadi modal kuat persatuan dari negeri Indonesia sebagai salah satu negeri yang kaya. Akan tetapi, jika rajutan dan ikatan keberagaman ini tidak bisa dijaga dan dilestarikan bisa memicu konflik yang berujung disintegrasi bangsa.

Dalam sejarah modern Indonesia konflik yang terjadi bukan hanya konflik ekonomi ataupun politik, akan tetapi juga konflik yang disebabkan oleh faktor perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat, seperti:

- a. Peristiwa atau tragedi seperti Tragedi Sampit di Kalimantan Tengah pada Tanggal 18 Februari 2001 antara Etnis Dayak dengan Madura yang berlangsung selama 10 hari dan memakan korban lebih kurang 469 orang.
- b. Konflik Maluku yaitu antara kelompok Islam dan Kristen yang menelan korban antara 8-9 ribu orang, 29 ribu rumah terbakar, 45 mesjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan dan 4 bank hancur.
- c. Konflik 1998, konflik ekonomi yang berujung kepada konflik sosial yang paling menyheramkan dalam sejarah Indonesia modern dan telah menelan korban yang sangat besar.

- d. Konflik antar golongan Agama (Syiah dan Ahmadiyah) Tahun 2000.
- e. Konflik Sumbawa dan Bali yang terjadi pada Tahun 1980 dan Tahun 2013 yang juga memberi dampak cukup mengganggu keberagaman pada masyarakat Sumbawa dan Bali itu sendiri.

e. Tinjauan Tentang Budaya

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta “*Buddayah*” bentuk jamak dari *buddhi* (akal) yang artinya segala hal yang berkaitan atau dihasilkan oleh akal atau pikiran manusia (Koentjaraningrat, 2002:181). Manusia dan kebudayaan adalah dua wujud yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Hari Poerwanto (2000:50) menyatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun manusia akan mati, kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya.

Budaya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) secara deskriptif, menitikberatkan pada pembentuk dari kebudayaan itu sendiri, 2) secara historis, kebudayaan itu diwariskan, 3) secara normatif, mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, 4) secara psikologis, fungsi budaya sebagai alat untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan, pemecahan masalah, dan pembelajaran dalam hidup, 5) secara struktur, budaya adalah hasil yang tersistem atau terpola, dan 6) secara genetik, merupakan hasil dari kemampuan berpikir manusia sehingga menghasilkan sebuah karya.

f. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial adalah salah satu term yang ada dalam kajian sosiologi yang merujuk kepada perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dan ikut mempengaruhi sistem sosialnya (Selo Sumarjan) atau terjadinya perbedaan-perbedaan dalam sistem sosial masyarakat yang dapat diukur yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu (Robert MZ LAwang). Perubahan sosial adalah alamiah dan akan selalu terjadi selama masyarakat itu eksis. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat memaksa masyarakat untuk mau dan harus berubah karena tuntutan dan desakan baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang dikehendaki

maupun yang tidak dikehendaki, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan akan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau inovasi baru dalam masyarakat (Gillin dan Gillin). Perubahan sosial juga terjadi akibat adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern (Durkheim) atau perubahan dalam hubungan sosial (Robert M. Mac Iver). Secara umum perubahan sosial dapat dimaknai sebagai berubahnya kondisi-kondisi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perubahan dalam pola interaksi dan komunikasi, hubungan sosial, inovasi maupun difusi baru dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena pada prinsipnya masyarakat selalu bergerak mobile dan dinamis tidak statis, perubahan yang terjadi dalam satu lembaga akan menjalar ke lembaga sosial lainnya. Ketika perubahan yang terjadi begitu cepat, maka akan terjadi disorganisasi meski sementara sebagai bentuk adaptasi diri.

Sementara itu, perubahan budaya lebih mengarah kepada perubahan dalam proses tata sosial di masyarakat, mulai dari cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara berpakaian, gaya hidup yang kebarat-baratan, emansipasi wanita atau kesetaraan gender, nalar kritis masyarakat yang semakin vulgar, hilangnya eksistensi budaya lokal seperti permainan dan alat atau musik tradisional, tergerusnya budaya nasional (Indonesia) dan penggunaan bahasa daerah yang semakin jarang (<https://Wikipedia.org>, diakses Tanggal 29 Juni 2017).

g. Konsep Kecerdasan Budaya

Kecerdasan Budaya adalah termasuk konsep baru yang pertama kali digagasaksikan oleh Early dan Soon Ang pada Tahun 2003 yang merujuk kepada efek dari globalisasi yang telah melahirkan interaksi antar budaya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, ketegangan dan konflik budaya (Ang, Dyne dan Tan, 2010). Sementara Kecerdasan Budaya sendiri dapat dimaknai sebagai: *“kemampuan individu dalam memahami, berfikir dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang bercirikan perbedaan antar budaya dalam berbagai konteks budaya yang bervariasi”* (Ang, dkk, 2014). Kalau dilihat lagi bahwa kecerdasan budaya ini mirip dengan kecerdasan sosial yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Sedangkan kecerdasan emosional adalah

kemampuan untuk memahami dan menghadapi emosi diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan budaya adalah kemampuan untuk memahami, mengelola dan berhadapan dengan emosi-emosi orang lain dalam konteks antar budaya atau merupakan bentuk spesifik dari kecerdasan interpersonal.

Ada empat faktor yang perlu dilihat dalam memahami kecerdasan budaya (Early & Ang, 2008), yaitu sebagai berikut: 1). **Pengetahuan** (Merujuk kepada struktur pengetahuan individu tentang institusi kultural, norma-norma, praktek-praktek dan konvensi-konvensi dalam setting budaya yang berbeda). 2). **Strategi** (kecerdasan yang mencakup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara dan aturan baru bagi interaksi sosialnya). 3). **Motivasi** (kemampuan individu dalam mengarahkan perhatian, minat dan energinya untuk terlibat, mempelajari dan berfungsi secara efektif saat berada dalam situasi perbedaan antar budaya). 4). **Perilaku** (kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku-perilaku baik verbal maupun nonverbal yang sesuai saat dia berinteraksi).

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode dalam riset ini diyakini sebagai *tools* untuk mendekati subjek guna mendapatkan deskripsi yang jelas tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi secara runtut, runut dan mendetail dengan *core problem* riset itu sendiri. Oleh karena itu, metode riset yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Pengungkapan fenomena sosial-politik di lokasi penelitian terhadap suatu kasus secara leluasa memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena data tersebut valid dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan rasional. Untuk itu dibutuhkan proses atau tahapan dalam proses pengumpulan data melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data sesuai dengan prosedur dalam studi kualitatif juga.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Konflik yang pernah terjadi di Sumbawa berdasarkan hasil wawancara kami dan diperkuat oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ada yang bersifat konflik Horizontal dan ada pula yang bersifat vertikal. Konflik horizontal yang pernah terjadi adalah konflik antara etnis Sumbawa dengan etnis Bali yang pernah terjadi dua

kali, yaitu pada Tahun 1980 dan berulang kembali pada tahun 2013 yang lalu. Hal menarik adalah bahwa konflik antar masyarakat yang terjadi di Kabupaten Sumbawa ini memang selalu melibatkan masyarakat dari dua yang berbeda etnis Bali dengan Sumbawa. Berdasarkan data lapangan bahwa konflik ini telah menggerus makna integrasi dan harmonisasi sosial beberapa waktu bahkan jika dilihat dari rentang waktu terjadinya kembali konflik yaitu lebih kurang 32 Tahun, memang tidak bisa dipungkiri oleh masih ada dan kuatnya *political memory* pada masing-masing etnis, sehingga kapan saja ketika memori-memori itu muncul maka kejadian serupa akan cepat bereskalasi menjadi konflik yang tidak terbandung.

Konflik yang terjadi baik itu konflik berbaur SARA maupun politik dan tambang yang terjadi di Sumbawa adalah dinamika dari masyarakat heterogen yang belum mampu sepenuhnya menjadikan fondasi-fondasi nilai-nilai luhur budaya dan adat-istiadat yang mereka miliki. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecemburuan sosial-ekonomi itu kalau diramu dan diracik dengan membongceng ideologi atau kepercayaan akan lebih cepat berubah menjadi sentimen anti yang membahayakan.

Kecerdasan Budaya dalam Upaya Pencegahan dan Resolusi Konflik

Pada umumnya semua nara sumber yang kami wawancarai memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat Sumbawa. Mereka menganggap bahwa masyarakat Sumbawa pada umumnya memiliki sifat terbuka, toleran dan demokratis. Hampir tidak ada masyarakat Sumbawa yang memiliki sifat tertutup, mereka ketika bertemu dengan sesama suku Samawa memiliki persamaan laku ketika bertemu dengan suku di luar Samawa seperti suku Jawa, Mbojo, Sasak, Bali, Timor, Madura dan lainnya sepanjang mereka bisa dan mau menghargai penduduk asli. Bukti empirik dapat dilihat dan dirasakan nuansa keragaman dan keharmonisan penduduk masyarakat Sumbawa sampai dengan penelitian ini.

Di bawah ini akan kami uraikan mengenai nilai-nilai kecerdasan budaya yang ada dalam masyarakat Sumbawa dan memiliki peluang sangat besar bagi pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, LSM/NGO maupun individu-individu atau kelompok yang mau konsen dengan studi-studi pencegahan dan penyelesaian konflik.

Nilai Pertama adalah berhubungan dengan *Pengetahuan*, masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang sampai sekarang masih berpegang kepada kearifan – kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai tinggi, tata laku, sikap maupun norma-norma adat yang

dipandang sebagai identitas *Tau Samawa*. Pengetahuan tentang pentingnya memiliki ilmu terutama ilmu agama yang tinggi, ilmu dunia untuk kehidupan di dunia, masyarakat yang perlu dididik agar mau dan bisa pintar, cerdas, tidak boleh ketinggalan dari orang lain, bahkan dengan tetangga di samping rumah sekalipun. Saking pentingnya menuntu ilmu atau memperoleh pengetahuan, bahkan ada pepatah yang masih dikenal dalam masyarakat Sumbawa sampai sekarang “*bote-bote mo, ade penting bau mu ete hikmah kaling nya*”, terjemahan bebasnya bermakna “*biar monyet pun, sepanjang bisa memberikan kamu ilmu, pengetahuan atau pengalaman, ambil saja*”. Sehingga dalam perjalanan kehidupan masyarakat Sumbawa sampai dengan penelitian ini dilakukan, internalisasi nilai-nilai lokal tersebut ternyata mampu menjadi perekat ikatan kebersamaan dan harmonisasi antar penduduk yang berbeda suku, agama maupun golongan. Melalui internalisasi nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai agama (Islam yang merupakan agama orang atau *tau Samawa*) inilah, kemampuan adaptif penduduk asli dengan pendatang pada masyarakat Sumbawa.

Kedua, Dimensi Strategi. Melihat dari hasil observasi lapangan maupun hasil interview dengan beberapa tokoh masyarakat yang *nota bene*-nya juga penggiat budaya Sumbawa. Masyarakat Sumbawa ternyata juga mampu membuat dan mengembangkan beragam cara untuk bagaimana agar bisa dan dapat melakukan interaksi maupun komunikasi sosial dengan yang lainnya. Misalnya dalam masyarakat Sumbawa dikenal dengan budaya atau tradisi *batulung, besiru, berape batompok, tokal rame, mangan barema, nimung barema* dan masih banyak lagi yang lain. Gaya atau cara-cara tersebut adalah salah satu cara jitu yang telah melembaga dalam laku keseharian penduduk Samawa (*baca:internal suku Samawa*) sejak dulu sampai sekarang (*meski sudah mulai tergerus oleh kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya perubahan sosial dan budaya yang cepat*) dan rupanya masih menjadi salah satu kekuatan yang bisa dianggap sebagai strategi jitu untuk membangun ikatan-ikatan dan harmoni kehidupan sosial yang ada dengan suku lain maupun dengan pemeluk agama lain yang kebetulan mendiami wilayah Kabupaten Sumbawa. Semua nilai-nilai dan laku adat-istiadat yang masih terpelihara dalam masyarakat Sumbawa tersebut, jika dikaitkan dengan faktor penting terselesaikannya konflik dengan cepat dan kemampuan masyarakat untuk menjaga irama-irama kedamaian dalam masyarakat menjadi sangat penting. Ini terlihat dari berbagai peristiwa konflik yang pernah terjadi dalam

masyarakat Sumbawa sejak Tahun 1980 yang lalu kemudian Tahun 2013 yang lalu, begitu juga dengan konflik-konflik yang bersifat vertikal yang pernah terjadi, di mana responsifitas yang cepat dari semua elemen masyarakat Sumbawa untuk menyelesaikan konflik sangat baik.

Sementara nilai *Motivasi* yang dimiliki penduduk Sumbawa yang kami lihat ketika masyarakat melakukan interaksi, komunikasi, sosialisasi bahkan imitiasi budaya (dalam hal-hal spesifik saja), pada umumnya mereka mampu mengembangkan sikap dan motivasi tersebut menjadi sebuah nilai universal yang bisa kita saksikan pada semua *tau samawa* ketika berada dalam komunitas berbeda dan ketika mereka berinteraksi dengan orang yang di luar komunitas mereka.

Begitu juga *Perilaku* atau kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku-perilaku baik verbal maupun nonverbal yang sesuai saat dia berinteraksi. Menurut penjelasan-penjelasan yang diberikan dan disampaikan oleh para nara sumber, bahwa secara umum sikap dan perilaku *tau samawa* memiliki karakter baik, sopan dan terbuka terhadap siapapun dan dari mana saja datang, yang terpenting mereka menghargai perbedaan yang ada dan dimiliki oleh penduduk setempat. Memang harus diakui bahwa tidak semua kelompok masyarakat pada suku atau *tau Samawa* menggunakan bahasa-bahasa lembut, akan tetapi kata atau ucapan-ucapan keras dan kasar yang keluar atau terdengar bukan berarti jelek, berkonotasi negatif atau menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar, keras, tidak sopan dengan orang lain atau pendatang. Akan tetapi, menurut penelitian-penelitian terdahulu bahwa pada umumnya orang Sumbawa gaya atau dialek mereka agak sedikit keras dan kasar ketika dikeluarkan, tetapi bukan berarti akan berhubungan langsung dengan perilaku mereka. Sikap atau perilaku tidak bisa selamanya dinilai dari bahasa atau dialek yang keluar dari mulut-mulut mereka.

Memang tidak bisa kita pungkiri, selama pembangunan belum merata dan berkeadilan, selama kebijakan masih tebang pilih, selama peran penegak hukum masih lemah dalam hal menegakkan hukum, selama perangkat-perangkat lunak ketahanan budaya tidak disiapkan, maka individu maupun kelompok masyarakat pasti akan rentan dengan konflik. Perangkat budaya yang kami maksud di sini adalah, bagaimana agar ke depan pemerintah dalam hal ini dinas/instansi dan lembaga kemasyarakatan terkait mampu membuat sebuah regulasi dasar untuk diterapkan dalam bentuk program-program

penting pembangunan sosial-budaya, di mana nilai-nilai kecerdasan budaya sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelumnya bisa menjadi sebuah entitas khas dalam membangun komunikasi – interaksi antar etnis atau kelompok yang ada dalam masyarakat Sumbawa khususnya.

Untuk mewujudkan agar kedepan konflik bisa dicegah, maka harus ada keberanian pemerintah untuk memperkenalkan sejak dini mulai dari SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi pentingnya nilai-nilai kecerdasan budaya dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan mereka masing-masing dan mulai memperkenalkan konflik (apa itu konflik, apa saja bentuk dan jenis konflik, sejarah konflik, sebab muncul konflik, peristiwa-peristiwa konflik, aktor dan stakeholder dalam konflik, nilai-nilai sosial – budaya lokal yang bisa mencegah sekaligus menyelesaikan konflik dan lain-lain).

Jika ditelisik lebih dalam lagi, kehadiran kecerdasan budaya dalam studi konflik ini dan jika dikaitkan dengan kemampuan masyarakat Sumbawa untuk mampu menjaga irama agar konflik tidak lama berlangsung dan tidak meluas. Sebenarnya secara tidak sadar masyarakat Sumbawa (generasi di bawah 80-an) masih mampu menempatkan tradisi menjunjung tinggi keberagaman dengan tidak menggenalisir hal-hal sepele untuk kemudian menjadi konflik terbuka yang berlangsung lama. Tradisi saling menghargai masih cukup kuat terlihat dan tidak semua stakeholder memerankan diri menjadi aktor konflik seperti misalnya pada kasus konflik 221 atau konflik Ropang, karena mereka selain masih trauma dengan kejadian Bali-Sumbawa Tahun 1980 juga percepatan informasi mengenai dampak dari konflik-konflik misalnya di Sampit, Ambon, Madura, Mataram dan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dalam masyarakat terutama bagi generasi muda ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai lokal ini semakin tergerus oleh dinamika perubahan bahkan imitasi budaya yang tidak bisa difilter langsung. Kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak, perkelahian yang berakhir pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang terjadi akhir-akhir di Sumbawa dan lainnya, membuktikan bahwa nilai-nilai lokal mulai tergerus dalam diri generasi muda, mirinya lagi anak-anak SMP/SMA banyak yang sudah lupa bentuk dan jenis-jenis adat-istiadat maupun tradisi – tradisi lokal yang justru bisa makin memperkuat ikatan kebersamaan antar sesama mereka maupun dengan kelompok atau orang lain di luar etnis atau *Tau Samawa* itu sendiri.

Penempatan kecerdasan budaya sebagai salah satu modal penting dalam membuat kerangka teoritik sekaligus praktis bagi pencegahan dan resolusi konflik yang terjadi di Kabupaten Sumbawa sekarang dan masa akan datang. Kecerdasan budaya memang belum begitu familiar bagi masyarakat dan dalam dunia akademik pun konsep kecerdasan budaya ini boleh dibilang baru dibandingkan dengan modal sosial, kecerdasan psikologis dan lainnya. Terma ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat khususnya generasi muda yang saat ini sedang terjebak dalam arus deras perubahan sosial-budaya. Tujuannya agar nilai-nilai lokal yang juga menjadi bagian dari kecerdasan budaya dapat terinternalisasi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Terkait dengan Urgensi Kecerdasan Budaya Masyarakat Sumbawa dalam rangka mencegah dan menyelesaikan konflik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya konflik di Kabupaten Sumbawa disebabkan karena adanya faktor Struktural, Akselerator dan *Trigger* (SAT) konflik, misalnya seperti: masih ada dan kuatnya *Political Memory* dalam Masyarakat. Adapun yang berperan sebagai SAT dalam Konflik yang pernah terjadi di adalah: a. Masih adanya sebetulnya kesenjangan Sosio-Ekonomi, adanya ketersinggungan Budaya, masih kuatnya pragmentasi sosio-politik dan Benturan antara Budaya dan kepercayaan penduduk asli dengan pendatang. b. Pada konflik Bali-Sumbawa Tahun 1980 adalah adanya kasus gadis Sumbawa yang dibawa lari oleh orang Bali. c. Pada konflik 221 yaitu terbunuhnya Arniati (Mahasiswa UNSA) yang melibatkan salah satu oknum anggota Polres Sumbawa.
2. Bahwa konflik di Kabupaten Sumbawa disebabkan oleh adanya Faktor SAT konflik, yaitu: *Pertama*, **Faktor Strukturalnya** adalah: a). masih ada dan kuatnya *political memory* dalam masyarakat Sumbawa ketika identitas yang berbaur agama dan kepercayaan tersebut diganggu. b). Masih adanya sebetulnya kesenjangan sosio-ekonomi antara penduduk lokal dengan pendatang, c). Pergeseran kemampuan penduduk lokal dalam mengakses berbagai resorsis alam yang ada karena daya saing yang masih lemah, d). Ketersinggungan Budaya antara Budaya dan Kepercayaan Penduduk Lokal dengan Pendatang

sebagai akibat globalisasi sekaligus modernisasi yang sudah merembes ke pelosok-pelosok desa. *Kedua, Akseleratornya* adalah: a). Kuatnya dukungan institusi terhadap individu yang kebetulan bernaung didalamnya dan mengakibatkan kohesi sosial dari luar institusi, b). Sakit hati penduduk lokal (Samawa) melihat berbagai sektor kehidupan seolah-olah dikuasai oleh etnis Bali, c). Terjadi semacam pembiaran oleh pemerintah atau penegak hukum ketika konflik masih dalam fase ketegangan dan kekerasan, d). Peran media massa dan online dalam membangun opini publik yang mengarah lahirnya konsolidasi massa dan berujung konflik, dan e). Terkait dengan Kasus Pembakaran Camp PT.NNT di Dodo Rinti, ini disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah dan juga Perusahaan untuk merespon aspirasi masyarakat terkait tenaga kerja lokal dan kemudian menimbulkan mispersepsi dan respon negatif masyarakat. sedangkan *Triggersnya* adalah masalah kawin lari, penembakan masyarakat, tewasnya Arniati dan Pembakaran Camp PT.NNT.

3. Pentingnya Kecerdasan Budaya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, karena semua aspek-aspek yang ada dalam Kecerdasan Budaya seperti: *Pengetahuan, Strategi, Motivasi dan Perilaku* ternyata memiliki relevansi dan kemampuan untuk mendorong dan menciptakan suasana yang aman, damai dan harmonis dalam masyarakat sepanjang masyarakat bisa dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Saran

Penelitian ini berhasil memetakan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat Sumbawa terutama yang berkaitan dengan konflik Etnis antara Bali dengan Sumbawa yaitu dikarenakan oleh masih kuatnya *political memory* dalam masyarakat Sumbawa sebagai akibat dari adanya kesenjangan ekonomi, sosial-budaya, ketersinggungan budaya yang bisa menjadi pemantik paling efektif untuk melahirkan konflik. Kemudian masih kurangnya kemampuan kebijakan untuk meng-*endors* aspirasi penduduk lokal dalam kebijakan pertambangan juga seringkali menjadi akibat dari lahirnya konflik tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat kajian yang lebih komprehensif mengenai Kecerdasan Budaya ini, sehingga

Kecerdasan Budaya bukan hanya sebatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan dalam rangka membuat regulasi-regulasi penting yang berhubungan dengan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan maupun metode-metode atau pendekatan baru untuk penyelesaian konflik bagi para pembuat kebijakan.

- b. Pemerintah Daerah perlu membuat semacam program pencegahan dan penanggulangan dini konflik berbasis Kecerdasan Budaya dengan melibatkan pemerintah dan komponen masyarakat baik stakeholder maupun shareholder yang ada, sehingga bisa lebih maksimal.
- c. Dinas terkait perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya masyarakat yang aman, damai, harmonis dan nir konflik melalui internalisasi dan pelestarian nilai – nilai lokal yang sarat dengan kearifan.

Daftar Pustaka

- A. Safril Mubah, *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*, Tahun 2011, Volume 24, Nomer 4, Hal: 302-308, Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya
- Amrullah & Sri Nurhidayati, *Identifikasi Faktor Struktural, Akselerator dan Trigger (SAT) dalam Konflik 221 di Kabupaten Sumbawa*, DIKTI Tahun 2015
- Auliyaul Hamidah, 2013, *Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013)*, Tesis, Universitas Pertahanan RI
- Amrullah, dkk, 2006, *Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Kabupaten Sumbawa*, Insosbook
- Ahmad Amin Dalimunte, *Implementasi Kebijakan Bahasa Dan Implikasinya Dalam Penguatan Identitas, Integritas, Dan Pluralitas Bangsa*, Jurnal Humaniora Teknologi, UIN Sumatra Utara, Vol. II No.I; Oktober 2016
- Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKIS.

- I Ketut Tika, M.A, dkk, *Bahasa dan Kategori Sosial pada Masyarakat Bali, Sasak, dan Sumbawa: Sebuah Kajian Sociolinguistik pada Rumpun Bahasa Bagian Timur Melayu-Polinesia Barat*, UNUD, 2015
- Ju, Lan Thun. *Pengantar Studi Perdamaian dan Teori Konflik Dasar*, Materi untuk kegiatan In Class I Program Pendidikan Fasilitator Perdamaian Berbasis Komunitas Untuk Pencegahan dan Penanganan Konflik Secara Cepat - Institut Titian Perdamaian, Cibogo-Bogor, 7 Maret 2008.
- Mahsun, *Konflik dan Akar Penyebabnya; Pengamatan Awal Terhadap Potensi Konflik di Nusa Tenggara Barat*, Artikel, Prof.Mahsun.com
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi, Cet. Ke.24). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murray Li, Tania. 2002. *Transformasi Masyarakat Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mansour Faqih, 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, Ikhsan. Dkk. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta:Yayasan Kemala.
- Mantja, Lalu. 1984. *Sumbawa Pada Masa Lalu, Suatu Tinjauan Sejarah*, Surabaya:Rinta.
- Eide, Asbjorn, Catarina Krause dan Allan Rosas. 2001. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Alihbahasa oleh: Rini Adriati, Depkumham RI Dan SIDA.
- Syaifuddin Iskandar & Ardiyansyah, *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*, Tahun 2010, UNSA Progress, Volume 23, Nomor 4, Hal: 286-292
- Syaifuddin Iskandar, *Resolusi Konflik Etnik Samawa Dan Etnik Bali, Di Sumbawa*, POPULASI, Volume 19 No. 1, Juni 2009
- Ulfah Fajarini, *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 2 Des 2014, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Tim Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional
- Usman, Sunyoto. 1999. *Arah Gerakan: Gerakan Politik atau Gerakan Moral dalam JSP* UGM, Vol.3 Nomor 2, Hal.146-161

Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zulkarnain, Aries, 2011, *Kepemimpinan dalam Adat Rappang Tana Samawa*, Ombak,
Yogyakarta

Curriculum Vitae Singkat Penulis

Amrullah, Menyelesaikan S2 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM Tahun 2012. Saat ini bertugas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Samawa Sumbawa

Muslim, Menyelesaikan S2 di Jurusan Sosiologi IPB Tahun 2005. Saat ini bertugas sebagai Wakil Dekan FISIPOL Universitas Samawa Sumbawa Besar NTB.

Sri Nurhidayati, Menyelesaikan S2 di FISIPOL Jurusan Administrasi Negara UGM Tahun 2012. Saat ini menjadi staf pengajar pada FISIPOL UNSA Sumbawa Besar, NTB

Wiw Noviati, Menyelesaikan S2 pada Program Magister Pendidikan Biologi, dan saat ini menjadi staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, NTB.

M. Salahuddin, staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, NTB